

# ILMU EKONOMI PEDESAAN BUKAN-BARAT

*Oleh: Egbert de vries*

(Diambil dari Buku Bunga Rampai Perekonomian Desa)

Di tahun-tahun pertama abad ini, beberapa sarjana ilmu sosial belanda mengembangkan sebuah aliran berfikir. Bahwa teori umum ilmu ekonomi yang dianut pada waktu itu (aliran-aliran klasik dan Austria) dan tidak berlaku secara universal. Khususnya, demikian argument mereka, desa-desa di Jawa tidak sesuai dengan anggapan-anggapan aksiomatis tentang adanya hasrat untuk memperoleh hasil-hasil atau keuntungan-keuntungan sebesar-besarnya, dan tidak sesuai dengan hipotesis-hipotesis lainya, yang menjadi besar bagi mekanisme-mekanisme harga pasaran klasik. Salah satu diantaranya adalah guru besar saya, J.C. Kielstra, yang mendekati berbagai fenomena dari sudut sector-sektor ekonomi yang dominan yang berguna. Bilamana dia percaya bahwa dinamika perkembangan berasal dari dan mesti berkembang di dalam superstruktur kolonial, maka adalah menarik perhatian untuk di catat, bahwa dia melihat "perlawanan" dalam struktur-struktur desa sebagai suatu yang pasif dan bukan suatu gejala revolusioner terhadap dominasi. Dengan demikian dalam dirinya sendiri mungkin merupakan suatu sumber perubahan.

Boeke yang muda itu dalam disertai doktrinya sebagai seorang ideolog-sosiolog-ahli ilmu ekonomi penjabat pemerintah, mendasarkan perbedaan itu bukan pada struktur kolonial, tetapi pada perbedaan-perbedaan pokok dalam ethos sosial dan motifasi ekonomi. Dia melihat jurang yang melebar antara ekonomi yang bergerak ke arah modernisasi (dan elite sosial) dan ekonomi pedesaan yang bertambah miskin serta macet, sebagai suatu tragedi. Dalam pandangannya, proses-proses perkembangan ekonomi yang terelakkan akan menghancurkan masyarakat desa atau sedikit-sedikitnya menyebabkan lonceng kematiannya berbunyi.

Haruslah diingat bahwa baik Kielstra maupun Boeke, mula-mula memberikan sumbangan-sumbangannya antara tahun 1900-1910, pada waktu dunia baru keluar dari suatu resesi agraria yang lama. Sedangkan perbaikan-perbaikan penting dalam produktifitas pertanian belum lagi di mulai, bahkan di Eropa pun belum. Sebaliknya industri, angkutan laut dan produksi beberapa komoditi dasar (termasuk pertambangan dan kehutanan) meningkatkan taraf kehidupan di beberapa bagian di dunia dan beberapa sektor ekonomi, terutama di Eropa Barat.

Seperti yang terlihat oleh wakil-wakil jawatan konsulen pertanian di Indonesia. Selama masa antara 1925 dan 1940, kita mempunyai pandangan lain tentang masyarakat petani. Oleh karena itu telah bertempat tinggal di suatu desa di bagian

barat-daya negeri Belanda, dengan petani-petani kecil dan pekerja-pekerja petani miskin, reaksi saya sendiri bahkan lebih negatif lagi dari pada beberapa rekan saya.

Boeke tidaklah melangkah jauh sejauh beberapa orang lain, yang bahkan mengemukakan bahwa tindakan-tindakan dan reaksi-reaksi rata-rata orang desa tidak dikuasai oleh alasan logis, tetapi oleh tradisi dan kebiasaan. Tetapi Boeke membedakan antara alasan-alasan ekonomi dan non-ekonomi. Petani Indonesia dikatakannya bertujuan untuk memelihara suatu pola produksi dan konsumsi yang satu. Tidak ada hasrat untuk bergerak lebih maju dari pada yang rata-rata. Oleh karenanya tidak ada pembentukan modal, tidak ada motif keuntungan. Tidak pula ada alokasi sumber-sumber (termasuk pekerja) menurut garis-garis optimal. Singkatnya, ada hambatan dari dalam yang tak terpisahkan dengannya.

Menurut Boeke, masyarakat semacam itu bisa hidup tenang tenteram dan serasi sampai dikonfrontasikan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi yang riil dari masyarakat modern dalam berbagai bentuk. Beruntung atau tidak, konfrontasi semacam itu telah terjadi. Tidak bisa di elakkan dan merupakan suatu proses yang memperkuat dirinya sendiri. Dalam pertemuan ini desa akan “hancur”. Dan dia menamakan masyarakat dalam dilema ini suatu masyarakat *dulistis*, khususnya bila terdapat perbedaan-perbedaan etnis yang pokok dalam masyarakat sebagai keseluruhan. Selama bertahun-tahun, Boeke dan yang lain-lain (Furnival untuk Birma) telah memperinci tema tersebut dalam suatu buku yang diterbitkan setelah Perang Dunia II.

Teori-teori Boeke berdasarkan perbedaan antara ekonomi pedesaan dan usaha perdagangan, kebanyakan non-Indonesia. Ketika banyak sarana sosial, termasuk saya sendiri dan rekan-rekan dalam jawatan konsulen pertanian pertanian mempersoalkan berlakunya teori-teori tersebut, alasan-alasannya berbeda dengan apa yang dikemukakan sarjana-sarjana sosial zaman berikutnya.

Memang, Boeke mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi “barat” bisa dipahami menurut analisis ekonomi neo-klasik yang paling berpengaruh pada waktu dan kegiatan ekonomi orang-orang desa luput dari analisis tersebut. Oleh karenanya, dia menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor sosial lebih penting dari pada motif-motif ekonomi. Bagi desa, pertukaran dipasar-pasar dianggap berbahaya dan dorongan bagi laba maksimal adalah kecil. Memang ini benar dalam banyak hal, tetapi tidak demikian di desa-desa yang misalnya tergantung pada ekspor karet. Tetapi bagian argumen kita, ini bukan berarti tindakan perorangan dan kelompok desa-desa khas Jawa tidak ekonomis rasional, tak dapat dianalisa dan diterangkan.

Setelah konperensi Konsulen-konsulen pertanian di Tanjungsari pada tahun 1925, jawatan pertanian memulai suatu studi komprehensif mengenai ilmu ekonomi pertanian petani, termasuk tenaga keluarga, sampai sangat terperinci. Penulis turut

serta dalam studi-studi itu dan pada tingkat terakhir untuk menulis banyak artikel mengenai hasil-hasilnya. Seluruhnya kira-kira 40 studi lapangan telah dibuat.

Di sana jelas-jelas diperlihatkan bahwa petani-petani Jawa. Di beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi Selatan. Menggunakan waktunya, tanahnya dan sumber-sumber airnya secara sangat efisien. Secara keseluruhan, terdapat pengguna uang yang amat wajar pula, karena kelangkaan modal dan tingkat bunga yang tinggi dan harus menghadapi kenyataan bahwa kemungkinan-kemungkinan investasi sangat terbatas (pengguna pupuk kimia dan alat-alat mekanis jarang sekali di waktu itu.)

Walaupun motifasi “sosial” dapat di perkenalkan waktu itu dalam usaha-usaha padat karya dan keputusan-keputusan mengenai penggunaan tanah dan air, motif-motif “ekonomis” pada umumnya merupakan faktor yang menentukan.

Dalam sebuah karangan pendek dapat saya kemukakan bahwa penggunaan pekerja dalam unit keluarga (kira-kira 1500-1800 jam pria dan kira-kira 1000 jam wanita dan anak-anak) merupakan perbandingan yang baik dengan pengguna pekerja dan usaha-usaha pertanian kecil di barat-daya Jerman (Baden dan Wurtemberg). Jika ditinjau lagi sekarang, maka yang paling menjelaskan adalah penemuan bahwa fleksibilitas dan mobilitas tertinggi dalam penggunaan tenaga kerja menyebabkan kesamaan hasil *rata-rata (bukan marginal)* per jam orang di atas tanah irigasi satu kilo padi per jam orang.

Demikianlah, dengan tidak mengurangi jasa-jasanya, thesis Boeke yang pertama kurang ada dasarnya memang ada alasan, alasan-alasan ekonomi dalam kehidupan desa dan usaha petani. Apabila memang ada sedikit saja pertanda tentang dualisme dalam masyarakat dan memang ada penjelasannya seharusnya di cari pada alasan-alasan lain.

Dari literatur yang banyak tersedia pada waktu itu secara khusus saya ingin memberikan rekomendasi bagi disertai doktor, rekan dan kawan akrab saya, Dr. C.J. Vink, yang diterbitkan dimasa perang dan hampir tidak dikenal dalam literatur internasional Vink mengkonsolidasikan berbagai studinya sendiri dan studio orang-orang lain secara menarik, dan menurut pandangan saya, secara menentukan. Tetapi Boeke rupanya tidak yakin, sebagaimana kelihatan dalam tulisan-tulisannya sesudah perang. Seorang penulis lain telah menyimpulkan argumentasi bolak-balik tersebut. Yaitu Profesor Van der Kolff telah berusaha keras untuk mendamaikan berbagai pendapat itu dan menempuh jalan tengah. Ketika mengemukakan “putih dan “coklat”, dengan tidak sengaja dia memperkenalkan perbedaan etnis dan rasial antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tetapi, sekali lagi ingin saya katakan. Warna kulit tidak ada hubungannya dengan alasan-alasan pokok, seperti halnya “kolonial” pun sama sekali tidak tepat, suatu kejadian sejarah yang kebetulan. Sekali lagi disayangi

bahwa banyak penulis setelah perang menganggap “sikap tidak suka kepada mekanisme pasar” dari petani kecil sebagai sifat yang menonjol dan bahwa istilah “pertanian-subsisten” diterima kalangan luas.

Sudah di tahun 1931 saya tunjukkan bahwa persentase hasil pertanian, ditukarkan atau dibeli di pasaran serendah-rendahnya 25 persen sampai setinggi-tingginya 100 persen lebih merupakan faktor insidental dari pada suatu faktor yang menentukan. Oleh karena itu istilah pertanian subsisten sebenarnya tidak ada tempatnya. Jikalau orang mengingini suatu istilah yang meliputi semuanya, maka istilah tersebut adalah “pertanian tradisional” atau “pertanian keluarga”. Dan memang, ada usaha-usaha di bidang kerajinan tangan. Atau pengolahan dan perdagangan kecil, bila tingkat pertukaran atau pembelian dan penjualan satu demi satu sangat berbeda. Tetapi tradisionalitas atau struktur organisasi kerja keluarga adalah mirip dengan kegiatan-kegiatan petani kecil.

Kami mengemukakan alasan bahwa sifat-sifat usaha keluarga adalah:

- 1) Input-inputnya (tenaga kerja dan hasil antara) amat saling melengkapi satu sama lain, dan/sangat mudah diganti oleh anggota-anggota dalam keluarga.
- 2) Terlepas dari pemusatan tenaga kerja yang lebih luas yang dilembagakan secara sosial pada saat tertentu dalam proses produksi, ada suatu kecenderungan untuk menghindari penerimaan tenaga kerja melalui pasaran.
- 3) Keadilan dalam distribusi yang penuh dengan kalangan anggota-anggota keluarga untuk memperoleh pembagian hasil.

Setiap ciri tersebut masih perlu diperinci lebih lanjut:

- 1) Sifat saling melengkapi acapkali di lembagakan dalam peran-peran tertentu penggarapan tanah, penanaman. Penyiangan. Memintal, menenun, dan seterusnya. Anak laki-laki mengurus kerbau, yang digunakan orang dewasa di sawah ini. Ini nampaknya statis, akan tetapi bila perlu atau bila ada kesempatan, peran-peran tersebut dapat digantikan dengan mudah.
- 2) Pemusatan tenaga kerja diperlukan bagi pekerja kelompok dalam perburuan. Penangkap ikan, persiapan tanah ladang. Demikian pula dalam pertanian yang sifatnya lebih individual, regu-regu penanaman atau yang memanen bekerja menurut pola yang teratur, acapkali dengan tingkatan upah yang ditetapkan secara tradisional. Penerima tenaga kerja yang lebih tetap acapkali dalam bentuk penerimaan anggota baru dalam keluarga. Dengan cara mengangkat anak melalui perkawinan seorang anggota keluarga.
- 3) Keadilan distributif. Apabila hasilnya cukup bagi setiap orang. Semuanya akan menerima bagian yang “pantas” tetapi mungkin tidak sama. Apabila bahan makanan atau sumber-sumber lain tidak mencukupi, maka “para pencari nafkah” atau “anak” didahulukan. Hal ini berbeda dari satu kebudayaan kepada kebudayaan yang lain.

Orang-orang yang lebih tua atau ibu rumah tangga bisa saja mendapat bagian paling akhir

Misalnya, istilah “unemployment” (pengangguran) diambil dari kegiatan perusahaan “industri” dan bahan “underemployment” (kurang pekerja) tidak menolong penerapannya. Dalam batas-batas secara ekologis dan dalam lingkungan pertanian keluarga. Setiap orang bekerja menurut kesanggupan. Mekanisme pengawasan adalah dalam memperoleh pembagian hasil. Batasan-batasan memang ada. Tetapi dalam sejumlah besar proyek penelitian yang sudah disebut di muka. Telah ditemukan bahwa jumlah jam kerja rata-rata setahun adalah 1500-1600 jam bagi laki-laki dewasa dan 100 jam bagi wanita-wanita dewasa di luar rumah. Jika diperhitungkan terhentinya pekerjaan di musim paceklik, jumlah ini mendekati tingkat pemanfaatan kerja secara penuh (full employment).

Oleh karena itu analisis tentang akibat penarikan tenaga dari usaha pertanian keluarga berdasarkan “nilai kerja marjinal” tidak perlu meyakinkan. Ada masa ketika bahkan kelompok-kelompok besar pun bisa bergerak menempuh jarak-jarak jauh (dari timur-laut mungthai kelembah tengah, dari Madura ke Jawa Timur, dari Banten ke Sumatera Selatan) tanpa merasa tersiksa dan keuntungan yang berarti berupa penghematan konsumsi di rumah dan kembali membawa uang. Ini adalah contoh pemusatan tenaga kerja musiman dengan ciri saling melengkapi (komplementer). Kopi di Sumatera Selatan, padi di Muangthai Tengah, tebu di Jawa Timur memerlukan pendatang-pendatang musiman.

Ada masa-masa di dalam siklus kehidupan seorang laki-laki muda atau wanita muda ketika tangannya tidak bisa dipergunakan. Dan mereka dapat tunjang dengan bekerja serta mencari nafkah di tempat lain. Contoh-contoh di Indonesia adalah orang-orang muda Minangkabau-di Afrika banyak contohnya. Pengorbanan suatu keluarga atau pun suatu unit yang lebih besar untuk menolong orang-orang muda untuk memperoleh pendidikan lanjutan jauh dari rumah. Diketahui benar ini acapkali di pandang sebagai “investasi jenjang panjang” karena hal semacam itu menyimpang dari cara memperoleh bagi hasil yang normal.

Kekurangan tenaga kerja yang terus menerus mungkin saja terjadi. Hal ini menyebabkan migrasi (datangnya orang Jawa di waktu panen ke Sumatera selatan. Atau ke bagian lain Sumatera atau Kalimantan di saat harga karet memberi harapan)

Demikian pula surplus tenaga kerja yang terus menerus bila saja ada. Ini menyebabkan tekanan untuk berpindah keluar naik permanen maupun secara setengah permanen.

Tetapi sekurang kurangnya migrasi selalu melibatkan suatu pribadi seutuhnya, acapkali lebih dari satu anggota keluarga. Anehnya konsep tentang faktor produksi yang tak berbagi yang acapkali terlihat sebagai ciri infrastruktur ekonomi (sebuah bendungan, jalan kereta api) atau alat-alat berat. Berlaku juga bagi seorang manusia atas sifat yang berbeda. Orang tidak bisa memberi makan setengah manusia. Oleh karena itu analisis tentang kerja dan produktifitas kerja diatur atas sifat yang berbeda orang tidak bisa memberi makan setengah manusia. Oleh karena itu analisis tentang kerja dan produktivitas kerja di atur atas sifat yang berbeda dari analisis marjinal klasik.

Lagi pula, definisi “tingkat upah” dalam sektor ini adalah keliru. Ada hubungan antara “hasil kerja keluarga” dan “pendapatan bersih bagi konsumsi” yang di sebut belakangan tidak saja tergabung kepada hasil kotor tetapi juga kepada pembayaran pajak, pelunasan hutang, dan sebagainya.

Dalam analisis-analisis yang berbagai ragam di Indonesia dalam tahun-tahun duapuluhan dan tigapuluhan, kita menemui *keseragaman dalam rata-rata* “pendapatan petani” selama satu jam kerja. Ini menunjukkan bahwa yang rata-rata itu menentukan batas sampai ke mana suatu keluarga (atau anggota keluarga) akan bergerak dalam usaha mendapatkan *equilibrium* antara usaha dan hasil yang di capai. Sekali lagi, ini rupanya dipengaruhi secara ekologis di daerah “miskin” angka rata-rata agak lebih rendah. Orang bisa saja mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kelakuan dalam memindahkan keluarga atau desa-desa ke seluruh wilayah di Indonesia (atau bahkan ke pulau-pulau besar di negeri ini)

Tak kalah menarik, ialah kenyataan bahwa sebagai kaidah umum tentang faktor produksi “tanah garapan” menentukan pendapat petani rata-rata per jam, dengan pendapatan para pemilik tanah menjadi dua kali lipat. Ini adalah sesuai dengan rumus bagi hasil 50 : 50 yang terdapat di mana-mana, atau bahkan teori yang lebih ambisius dari Johann Heinrich Von Thunen mengenai “sewa tanah yang adil” yaitu, 50 persen dari hasil panen jika tidak terdapat tambahan-tambahan tertentu pada modal yang ada.

Demikianlah, dalam rangka usaha keluarga terdapat pula keajegan, kemungkinan untuk diramalkan (predictability) oleh karenanya ada pula yang kita namakan rasionalitas (yang disebut terakhir ini tentu saja satu istilah konvensional pula).

Pendek kata kita bertanya kepada diri sendiri: Jika anda tinggal di desa itu dengan tanah sawah seluas 0,7 hektar dalam hal mana saja perilaku anda sama dan dalam hal mana berbeda? Jawabannya memperlihatkan bahwa sedikit sekali

kesempatan untuk berbuat lain. Barangkali bagi rata-rata petani Jawa, lingkungan alam dan ekonominya sangat membatasi kesempatan-kesempatan lain baginya untuk membuat percobaan atau perubahan.

Hal ini mengantarkan kita kepada masalah lain dalam perbincangan kita, apakah sikap terhadap dan apa pengaruhnya perubahan teknologi?

Di sini jawabannya tidak bisa diberikan secara sederhana atau umum.

Tanaman-tanaman baru diterima dengan penuh kegairahan selama persyaratan dalam tenaga kerja dan tanah tidak jauh lebih berat dibandingkan dengan penggunaan fasilitas-fasilitas ini sebelumnya. Perkebunan karet rakyat di Sumatera dan Kalimantan merupakan tiruan yang diolah secara bebas dari perkebunan perkebunan karet Malaysia dan dalam arti tertentu baru ditemukan pejabat-pejabat Hindia Belanda setelah perkebunan itu sudah lama ada. Kesempatan buat tambahan diterima dengan tangan terbuka dan pada umumnya digunakan. Sekurang-kurangnya hal ini bukanlah sebuah bukti tentang jiwa yang statis.

Penggunaan tanah dan tenaga kerja yang bersaing membutuhkan jauh lebih banyak pertimbangan. Pada umumnya terdapat banyak untung dan kerugian. Mana yang lebih berat?

Umumnya keluarga-keluarga dan desa-desa atau kabupaten-kabupaten dengan tingkat pendapatan di atas rata-rata rupanya lebih mudah menerima risiko suatu pembaharuan. Hal ini sangat masuk akal, sebab 10 persen di atas atau di bawah garis "kemiskinan mutlak" menimbulkan perbedaan yang sangat besar dalam menilai mana yang untung dan mana yang rugi.

Menggantikan tanaman lama, atau cara pemeliharaan tanaman dan ternak, atau memperkenalkan bibit dan pupuk yang baru, dan sebagainya merupakan proses yang lebih sulit lagi. Orang akan mengambil sifat menunggu dan melihat. Membandingkan hasilnya dengan para tetangga yang lebih berani, baru pada akhirnya muncul dan menyesuaikan diri dengan gerakan baru tersebut. Kita harus mengeerti bahwa dalam usaha pertanian (irigasi, wabah dan penyakit, syarat pemasaran, dan seterusnya) suatu pembaharuan semacam ini pada suatu saat tertentu mengubah lingkungan alam dan ekonomi desa dan usaha pertanian individual.

Sikap berhati-hati barangkali disusul dengan pengambil alihan secara besar-besaran adalah bijaksana.

Ini berarti bahwa keuntungan usahawan atau petani perintis model Schumpeter adalah paling besar dalam kesempatan penambah. Dan berkurang bilamana terdapat banyak yang saling bertentangan dan saling mengganti.

Tidak satu pun di antaranya yang berada di luar batas “perilaku usaha” yang normal. Bahkan juga tidak bila serangkaian input-input yang sama sekali baru ditawarkan sebagaimana dalam beberapa sistem “revolusi hijau”. Tidak ada satupun diantaranya memperlihatkan sikap menentang yang sifatnya mendasar terhadap “teknologi”, walaupun konsekuensi penggantian yang penting dari cara kehidupan lama terasa berat bagi pikiran para pengambil keputusan.

Dahulu kala dalam zamannya Boeke, sedikit-dikitnya di sebagian besar pulau Jawa, hanya terdapat sedikit perubahan dalam pertanian yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, setidak-tidaknya penyesuaian berjalan lambat. Baginya, tantangan besar berupa adanya pabrik-pabrik dan tambang-tambang (yang sedikit jumlahnya) dan perkebunan-perkebunan (dalam jumlah besar). Kesemuanya ini memerlukan tenaga kerja tambahan yang harus dikerahkan dari para penduduk desa (kota-kotanya kecil atau sangat terbatas): perkebunan-perkebunan selalu bersaing untuk memperoleh tanah dan kadang-kadang bersaing dalam pasaran lokal, nasional atau internasional buat hasil-hasil mereka. Secara keseluruhan, Boeke menganggap segalanya ini sebagai unsur perusak dan membahayakan struktur kehidupan desa. Dia mengakui bahwa semuanya timbul dalam proses sejarah dominasi kolonial dan bahwa “perusahaan model Barat” tidak bisa dihapuskan dari sejarah Indonesia.

Tanpa ragu-ragu, sekarang orang bisa mengatakan bahwa analisisnya sebagian besar dibenarkan dan bahwa usaha untuk mendapatkan alternatif-alternatif sepenuhnya dibenarkan. Adalah sebagian karena kekakuan struktur-struktur ekonomi politik bahwa usaha ini tidak dilakukan dengan lebih tekun.

Sebaiknya Boeke mempergunakan pula pendekatan yang lebih historis.

Pembelian rempah-rempah di abad menengah sifatnya sepenuhnya saling melengkapi, meskipun dalam rangka struktur kekuasaan dan “sistem pajak setempat”. Bahkan sistem tanah paksa pada mulanya dimaksudkan untuk memungut pajak dalam upah dan pengolahan hanya dari “surplus 10 persen bagi penguasa pusat” usaha ini gagal sebab terjadi persaingan dalam mendapatkan tanah dan tenaga kerja dan ternyata akhirnya sistem itu merusak struktur desa, pabrik-pabrik gula terpaksa menyewa pekerja daripada mengerahkan “sistem pajak bagi tenaga kerja”, walaupun mereka terus menggunakan tanah dalam persaingan dengan penggunaan lain. Trade off dekade-dekade pertama berupa pembelian kayu bakar secara besar-besaran, kapur bakar dan bungkil kacang (hasil sampingan minyak lampu di pulau Jawa). Kegiatan-kegiatan ini bersifat pelengkap dan karena menguntungkan. Sayangnya, teknologi modern memperkenalkan bahan-bahan kimia dan pupuk impor dan pabrik-pabrik gula semakin bersaing satu sama lain dan semakin tidak saling menunjang (sejak lama gerobak sapi tetap merupakan salah satu dari kesempatan-kesempatan yang disukai bagi usaha desa).

Ketika industri gula mulai mempertahankan diri, dengan memperhitungkan sejumlah besar kesempatan kerja tambahan, saya berkesempatan untuk mengemukakan bahwa titik puncak tenaga kerja bagi industri tersebut musim hujan jatuh bersamaan waktunya dengan titik puncak tenaga kerja bagi kegiatan petani: karenanya hal itu bersaing dan bukannya melengkapi struktur desa. (Tidak perlu dikatakan bahwa beberapa pejabat sama sekali tidak menyukai analisis saya).

Perkebunan-perkebunan tetap (terutama karet, teh, kopi) dengan kontrak-kontrak jangka panjang di dalam undang-undang pokok agraria tahun 1870 dianggap sebagai perintis bagi tanah-tanah yang sampai waktu itu tidak ditempati. Fungsinya ialah untuk menambah kesempatan kerja dan pendapatan devisa untuk membiayai pembangunan Negara. Di pelbagai daerah suatu angkatan kerja tetap harus dimasukkan dari luar dan ditempatkan di perkebunan-perkebunan. Di sini analisis Boeke tidak berlaku. Para pekerja berlaku dan diperlakukan sebagai "pekerja industri professional".

Dalam ukuran terbatas (Holle di Garut dengan teh) ada suatu symbiosis melalui pemakaian tanah tambahan bagi produksi daun teh petani dan pembuatan pabrik. Umumnya di Jawa dari tahun ke tahun, perkebunan-perkebunan semakin tergantung pada pekerja "tak penuh" (part time) dari desa-desa sekitarnya dan buruh pindahan untuk panen. Yang disebut belakangan ini adalah pekerja musiman. Tidak ada diantaranya yang bersaing secara sungguh-sungguh dengan pekerjaan utama di desa itu sendiri. Umumnya "pekerja" akan memilih yang terakhir (penggarapan tanah, panen) kalau dia harus memilih.

Tetapi sebaliknya, walaupun ada pasaran-pasaran dunia (sekali-kali sangat menguntungkan), apakah pekerjaan serapan dari desa ini tidak berharap untuk dibayar lebih dari pendapatan rata-rata dalam usaha pertanian tradisional ditambah dengan sedikit "ongkos jalan", sebagai ganti rugi karena "makan di luar rumah?" Upah memang rendah pada waktu itu, walaupun dibandingkan dengan perkebunan-perkebunan di daerah perintis. Tetapi tindakan sepihak untuk membayar upah "lebih layak" pasti akan gagal, karena seorang "makelar buruh" akan menghabiskan selisihnya.

Apakah reaksi dari pihak desa atau petani-petani terhadap perkebunan sifatnya disfungsional?

Sudah pasti masyarakat pribumi tidak memperoleh keuntungan dari melonjaknya harga-harga dunia, sekurang-kurangnya kalau ada, maka harga sangat merosot sekaligus bersama dengan pengusaha perkebunan.

Saya tidak bisa melihat bahwa masing-masing dari keduanya itu telah berbuat lain. Ada dua macam tindakan perbaikan yang diusahakan di Indonesia sebelum Perang Dunia II.

- (a) Bersama dengan produsen-produsen barang-barang lain bagi pasaran dunia mempertahankan tingkat harga. Ini telah dilakukan untuk karet, gula, teh, timah, sejak pertengahan tahun duapuluhan.
- (b) Usaha “kapitalis” yang menguntungkan dikenakan pajak, ditambah pula dengan tindakan sosial yang intensif. Ini telah diabaikan terlampau lama, dan kemudian menemui halangan-halangan organisatoris yang besar sekali.

Suatu jenis tindakan perbaikan ketiga, yang diambilkan presiden Sukarno ialah:

- (c) Nasionalisasi perkebunan-perkebunan. Seperti yang diperlihatkan sejarah sejak tahun 1957, tindakan ini sendiri tidak merobah hubungan-hubungan dasar antara perkebunan-perkebunan dengan para pekerja. Tetapi sudah ada suatu gerakan yang sejalan. Petani-petani mulai semakin banyak menambah hasil bumi komersial (ekspor) dalam berbagai kegiatan dan mereka memasuki pasaran sebagai saingan.

Setelah perang dunia II Boeke demikian kecewanya dengan usaha-usaha bagi stabilisasi dan peraturan-peraturan kesejahteraan sosial (upah minimum) dari masa sebelum perang sehingga dia merasa bahwa sistem perkebunan secara keseluruhan telah menjadi usang. Sekali lagi pendapat kami agak berbeda. Saya setuju bahwa dengan beberapa kekecualian seorang pekerja perkebunan Indonesia akan sanggup memproduksi atas tanggung jawabnya sendiri dan bahwa penelitian, pengembangan, kredit dan jasa-jasa pembantu lain dapat diorganisasi dengan baik.

Tetapi nampaknya ada suatu perbedaan besar antara tanaman-tanaman yang dapat diolah dalam ukuran kecil dan dengan modal yang kecil (kopra, lada, kopi) sedangkan perkebunan-perkebunan memerlukan pengolahan besar-besaran (terlebih gula dan kelapa sawit) dan yang sebagian besar telah mengalami kerugian. Karet dan teh mungkin dapat dimasukkan ke dalam golongan pertama. Professor Baas Becking, ahli fisiologi tumbuh-tumbuhan berpendapat bahwa bilamana dipakai anti oxydant minyak kelapa sawit pun mungkin bisa diolah secara kecil-kecilan.

Dalam bagian dialog ini saya telah menyinggung tentang sesuatu yang nampaknya merupakan masalah akademis, sebab teknologi yang diperbaiki adalah polyvalent. Sekali-sekali dia lebih sesuai bagi usaha besar-besaran kapitalistis atau perusahaan pemerintah, kadang-kadang memudahkan usaha gotong-royong (crumb rubber), kadang-kadang menguntungkan usaha keluarga (berhasil melawan wabah ulat sutera). Oleh karena itu, apabila ahli-ahli ekonomi modern menulis tentang pengaruh teknologi atas pertanian (atau industri), harus diselidiki teknologi apa. Tidak semuanya membutuhkan perluasan usaha pertanian atau industri. Huller padi di desa bias sekali sekali menyaingi dan mengalahkan pabrik beras yang lebih besar. Tetapi bila batang-batang padi tidak dipergunakan dalam cara yang baru, maka akibatnya bisa terbalik.

Petani dan ekonominya, pemakaian tanah dan pekerja, kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha-usaha tambahan senantiasa bergerak menurut irama teknologi dan irama pasar yang dinamis yang secara nasional dan internasional sama dalamnya

seperti perusahaan-perusahaan besar. “ilmu ekonomi keluarga dan pabrik sama tapi tak serupa” itulah yang ingin saya katakan.

Negara-negara berkembang dalam arti tradisional PBB dan organisasi-organisasi serupa, harus bergerak maju ke dalam wilayah pedesaan. Kita sungguh lamban mempelajari cara mempengaruhi petani agar masuk ke dalam pola perkembangan yang riil. Tetapi kita memang gesit mempelajari rintangan-rintangan yang sangat mempengaruhi pertumbuhannya.

Yang pertama, khususnya di kawasan Asia yang mengenal musim kering dan hujan adalah masalah kepadatan penduduk yang berlebih-lebihan di pedesaan, karena itu terdapat tanah pertanian yang rata-rata kecil, hampir tak masuk akal bahwa kebutuhan konsumsi pokok dibebankan pada produksinya, sehingga sedikit sekali terdapat peluang bagi tambahan pendapatan dan tabungan.

Yang kedua, bahkan lebih luas lagi bahaya kerusakan tanah, erosi, dan kemampuan produksi tanah pertanian yang semakin menurun.

Rintangan ketiga, berhubungan dengan kesulitan-kesulitan untuk membentuk staf-staf jawatan produksi, administrasi dan sosial di daerah-daerah pedesaan. Kebanyakan orang terpelajar merasa bahwa sangat sulit hidup di sebuah desa tanpa “kenikmatan hidup moderen” apa pun. Demikianlah pemecahan masalah-masalah pokok ini secara menyenangkan masih jauh.

Hubungan masalah-masalah ini dengan fungsi produksi atau perilaku yang rasional sedikit sekali, walaupun ada maka hubungannya sangat jauh dan abstrak.

Kembali kepada penemuan-penemuan dasar dari pertentangan antara pertanian perkebunan yang “dinamis, kapitalistis” dengan para petani di sekitarnya, seharusnya bisa diambil jarak dari istilah “kolonial” atau “eksploitasi” dan dianalisa apa yang tersirat dalam pertentangan seperti itu. Ada dua faktor rupanya yang menjadi sebab, yaitu mengabaikan masyarakat “dualistis” atau masyarakat “majemuk” (multiple-society).

Yang pertama, ada hubungannya dengan perbedaan dalam mobilitas sumber-sumber. Dalam suatu masyarakat tradisional tanah merupakan faktor yang sangat tidak mobil dalam produksi. Acapkali sama sekali tidak ada pergantian pemilik tanah, (“pemilikan tanah komunal”), kecuali bagi generasi turun temurun, atau penggunaannya tergantung pada izin pemerintah. Di pihak lain, pekerja sangat mobil. Di dalam masyarakat tradisional, secara fungsional para pekerja sifatnya mobil sekalipun ada yang memberikan batasan agar jenis pekerjaan tertentu adalah buat lelaki, yang lain bagi wanita. Tetapi pada pokoknya, setiap orang bisa mengerjakan tanah dan semua generasi bisa menenun pada alat tenun yang sama.

Sebaliknya, dalam masyarakat kapitalistis, sumber yang paling mobil dan encer adalah uang, yang bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan konsumtif atau produktif yang tidak terhingga banyaknya. Suatu sumber lain, manajemen (organisasi, keahlian usaha) secara fisik mobil pula, sebab sangat berorientasi kepada keuntungan.

Pertentangan dalam pengertian Boeke antara sektor-sektor “kapitalis” dan “tradisional” dalam ekonomi terjadi bila masing-masing ingin memenuhi tujuan-tujuannya sendiri dalam kehidupan, dengan mempergunakan faktor-faktor khusus yang menguntungkan dari pihaknya. Kelompok manajemen bisa mencarikan uang dalam perdagangan, tenaga kerja upahan dan kredit serta sektor tradisional membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih beraneka ragam. Sektor manajemen membutuhkan tenaga kerja dan tenaga kerja tersedia dengan biaya marginal, tepat diatas tingkat subsisten. Sektor tradisional sanggup melakukan ini karena mudahnya saling mengganti tenaga kerja dalam dirinya .

Dalam usaha mencari uang, sektor tradisional acap kali mejadi “transisional” sifatnya, tanpa menyadari akibat-akibatnya. Karena adanya perbedaan (yang besar) dalam tingkat bunga (akibatnya langkanya uang, kredit dan modal), sektor manajemen mampu memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan kredit dengan syarat-syarat yang nampaknya amat menguntungkan pada satu pihak dan luar biasa rendahnya bila dilihat di pihak lain. Karena sifat tanah yang tidak bergerak, maka tanah dalam pengertian luas sebagai sumber pertanian (perkebunan), kehutanan dan mineral, menjadi sasaran utama kelompok manajemen.

Tanah bisa milik swasta, atau konsesi, milik negara (termasuk kapitalisme negara). Dalam pertentangan tentang masalah konsesi (bagi perkebunan-perkebunan) dan sumber tenaga kerja yang luas Boeke melihat gejala-gejala dualisme. Memang benar, konsesi walaupun lebih diatur menurut pertimbangan kepentingan umum dari pada hak milik swasta menimbulkan monopoli setempat. Ada monopoli dalam permintaan tenaga kerja yang kemudian digabungkan dengan pasar bebas yang penuh persaingan dipihak yang menempatkan tenaga kerja itu. Ini mudah sekali menyebabkan adanya kredit murah (bahkan “penyogokan”) dan tenaga kerja murah serta ketergantungan kepada pasar pasar internasional. Peleburan ke dalam cabang-cabang pertanian, kehutanan atau pertambangan (termasuk minyak bumi) yang dimiliki dan diusahakan negara memberikan kepuasan kepada monopolis sebagai pihak pencipta kesempatan kerja, dan  *mungkin* mengurangi kebutuhan untuk menyediakan kredit atau uang muka untuk menyewa tenaga kerja.

Hal ini akan menuju kepada monopoli negara, menyebabkan cabang kegiatan tersebut menjadi kegiatan negara. Bagi jasa-jasa pokok serta sumber-sumber pokok (yang berhubungan dengan tanah), keadaan ini menjadi semakin umum. Dan memberi harapan bahwa sebagian keuntungan yang lebih besar akan disalurkan langsung dan

bukan tidak langsung (melalui *royalties*, upah, pembelian-pembelian dan pajak) ke dalam kas negara dan bank sentral. Ini menimbulkan masalah agak “baru” lagi perihal *pemusatan dana anggaran belanja* pada satu atau beberapa sumber. Minyak bumi negara, tembaga atau perusahaan negara di bidang mineral lainnya merupakan contoh-contoh yang cukup memberi gambaran.

*Perusahaan internasional* patut dibahas khusus dalam pembicaraan tentang “dualisme” dalam masyarakat.

Badan ini berbeda dengan “perusahaan asing” terutama karena kesanggupan dan kecenderungannya untuk bekerja di beberapa negara sekaligus. Hubungan ini komprehensif sejauh menyangkut pasar baik tenaga kerja (termasuk manajemen) dan pasar bagi hasil produksi. Tetapi sifatnya kooperatif atau dipusatkan atau monopolistis (dengan garis batas yang sangat halus diantara mereka) dalam pengambilan keputusan atas kebijaksanaan investasi. Unsur terakhir ini meningkatkan mobilitas dana bagi perluasan atau intensifikasinya. Tetapi sekali modalnya ditanam, maka tanah dan sumber-sumber tambang tak akan beralih tangan karena adanya penawaran sejumlah besar modal yang tak bergerak. Perbankan internasional merupakan kekecualian dari hukum ini. Karena *asetnya* yang sangat mobil, maka bila terjadi nasionalisasi hanya akan didapati sebuah rumah kosong berupa gedung bank tidak ada modal, tidak ada manajemen dan hanya ada beberapa staf ahli. Politik pemerintahan, di negara-negara tempat penanaman modal, pada umumnya berusaha untuk memperbesar kelemahan perusahaan itu terhadap tindakan pemerintah, yakni menjadikan perusahaan itu lebih responsif terhadap perusahaan pemerintah.

Urusan-urusan ini mungkin, tetapi tidak harus terutama berhubungan dengan tingkat-tingkat upah atau pembelian dalam negeri dari *leveransir-leveransir* kecil seperti berlainan halnya dengan perusahaan swasta besar atau kecil.

Misalnya pengalaman nasionalisasi perkebunan-perkebunan tebu di Jawa nampaknya merupakan petunjuk agar pasti bahwa tuntutan-tuntutan terhadap efisiensi dan pengurangan biaya dalam proses produksi mengakibatkan adanya praktek yang sangat “kapitalis” dalam hubungannya dengan orang desa. Bahkan mungkin kekuasaan pemerintah daerah bersekongkol dengan kekuasaan uang.

Masalah umum yang muncul dari situasi yang beranekaragam ini, ada hubungannya dengan “neraca perdagangan” antara dua atau beberapa daerah dalam suatu Negara apakah neraca perdagangannya akan didasarkan pada produktivitas (marginal atau rata-rata) dari kelompok-kelompok yang mobil tenaganya atau mobil modalnya?

Pada umumnya, tenaga kerja bisa diperoleh pada suatu tingkat harga, jelas tetapi tidak terlalu banyak diatas tingkat pendapatan kelompok-kelompok pencari kerja.

Urbanisasi pemukiman disekitar perusahaan besar yang baru, bahkan proses perpindahan tenaga-tenaga intelektual dan pekerja kasar dari negara-negara berpenghasilan rendah ke negara berpenghasilan tinggi, merupakan gejala proses ini.

Tidak ada satu pun kekuatan ekonomis yang nyata yang bisa mengimbangnya dalam masyarakat ini mesti dicari ditingkat sosial dan (atau) politik.

Serikat buruh adalah suatu strategi majemuk yang mengejar sasaran ekonomi sosial dan politik sekaligus. Secara keseluruhannya seringkali buruh mempunyai peluang lebih baik dan dukungan masyarakat yang lebih banyak terhadap perusahaan asing swasta yang relatif lebih kecil daripada bentuk perserikatan industri lain apa pun (swasta internasional, atau kerja sama dengan perusahaan setempat atau yang dijalankan pemerintah). Industri, termasuk pertanian besar-besaran komersial (Amerika Latin), yang berdasarkan elit kapitalis setempat, berada dalam situasi yang tidak menentu. Bila kekuatan berada di tangan suatu minoritas etnis (orang Tionghoa di Asia Tenggara, orang India di Afrika Timur, orang Libanon di Afrika Barat, orang Yahudi di Eropa), maka argumen-argumen politik bahkan rasial bergabung jadi satu dengan pertimbangan-pertimbangan politik dan sosial. Mereka bisa dilindungi, ditolerir atau dikejar-kejar, tergantung ke mana angin tertiuap.

Bahkan perbedaan daerah jika benar, seperti di Brasilia, sekaligus bisa menjadi cacat pembawa bencana ataupun *privilege*.

Jika kekuatan-kekuatan ekonomi, organisasi dan politik ini hanya membawa akibat yang tidak menentu dan pengaruhnya marjinal terhadap tingkat hidup kelompok-kelompok termiskin, manakah kebijaksanaan sosial yang bisa dianut?

Hanya apabila dipenuhi syarat-syarat yang agaknya mustahil, misalnya pertumbuhan penduduk yang mendekati titik nol, menyebarnya orang yang bisa membaca dan menulis secara fungsional dan organisasi buruh yang kuat tetapi amat menahan diri, sesungguhnya hanyalah sebuah keuntungan marjinal yang dapat diharapkan dari hubungan-hubungan ekonomi langsung melalui tenaga kerja atau penjualan.

Sebaliknya perusahaan-perusahaan besar (apapun status hukum dan manajemennya) memberikan sumbangan secara tidak langsung. Pada gilirannya hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika sumbangannya dalam bentuk menambah jumlah infrastruktur (jalan, jembatan, sekolah, poliklinik) maka penggunaannya harus terbuka bagi setiap orang dan tidak terbatas pada para buruh dan keluarganya. Sumbangan utama haruslah dalam bentuk pajak atau keuntungan (dalam hal perusahaan negara).

Terlepas dari monopoli ekspor internasional, perusahaan apapun bentuknya akan bercita-cita untuk mampu bersaing di dalam pasaran internasional. Sekali-kali dia akan meminta hak istimewa atau bebas pajak, atau subsidi langsung. Dalam hal itu kelompok “miskin” dalam suatu masyarakat membantu yang “kaya” suatu gejala yang tidak asing lagi di banyak negara.

Akan tetapi, hal inipun mungkin yaitu “menyisihkan” sebagian pasar bagi perusahaan-perusahaan kecil. Dalam zaman krisis di tahun-tahun tiga puluhan di Indonesia, sistem ini dijalankan dengan pembatasan impor bagi hasil-hasil yang diproduksi sendiri dalam *perusahaan-perusahaan kecil*, misalnya dengan pembatasan jumlah rokok yang dibuat mesin, dengan demikian membebaskan industri kretek sepenuhnya. Ini akan merupakan suatu kebijaksanaan industri (atau pertanian yang diarahkan secara sosial).

Namun demikian kebijaksanaan pertanian Amerika Utara dan Eropa, sama halnya dengan kebijaksanaan pertanian pada umumnya di Rusia, merugikan usaha pertanian kecil dan karena itu tidak banyak membuka cakrawala untuk diterapkan secara berhasil di negara-negara yang jumlah penduduk desanya amat padat.

Dengan demikian, perlu dikembangkan sektor-sektor ekonomi tradisional atau transisional dengan tindakan-tindakan khusus dan terpisah dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia yang dipungut dari keuntungan dan pajak (perusahaan negara). Adalah sebuah kenyataan bahwa Boeke sendiri telah meramalkan perlunya tindakan semacam ini dalam suatu karangan yang merupakan tonggak penuntun di tahun 1927 ke arah pembangunan manusia dalam ekonomi dan bukannya kekayaan fisik. Dalam perencanaan dan kebijaksanaan negara ide-ide ini baru dirumuskan kembali sekarang setelah hampir setengah abad.

Di negara dengan satu sektor ekonomi yang tumbuh dengan laju terlebih bila dipusatkan di ibukota yang mengambil segala-galanya amatlah terasa kebutuhan untuk membantu daerah-daerah pedesaan dengan suatu latihan massal untuk membangun gairah hidup yang baru. Kebijakan semacam ini menuntut adanya tindakan khusus untuk meningkatkan produktivitas dari mereka “yang termiskin dari yang miskin” orang-orang yang dalam arti tertentu adalah korban-korban pembangunan.

Sesungguhnya apakah itu teori dualistis atau tidak gejala itu ada beberapa kelompok tertentu di dalam masyarakat semakin berkurang kesempatan dan pendapatannya.

Di Filipina didapati bahwa pendapatan keluarga dari 20 persen dari usaha yang termiskin, dalam persentase pendapatan keluarga rata-rata secara nasional turun dari 23 persen ditahun 1956-57 menjadi 17 persen ditahun 1965 (dan 18 persen ditahun 1971). Sumbangannya dalam pendapatan nasional merosot dari 4½ persen menjadi 3,7

persen. Seperti yang telah dibuktikan penulis, kelompok ini telah menjadi lebih miskin bukan hanya dalam arti relatif, tetapi bahkan dalam arti mutlak.

Pusat Kesejahteraan Sosial baru yang ditunjang PBB untuk pembangunan yang didirikan di Manila di tahun 1975, bertujuan mempelajari dan menyusun daya upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang mendesak dari kelompok tersebut.

Pendekatan yang paling memberi harapan ke arah perbaikan produktivitas dan pendapatan dalam pertanian tradisional *tidak* tergantung kepada konsep dari cara penalaran dan pengambilan keputusan yang lain, tetapi kepada pemahaman yang mendalam oleh para “pembangun” dalam struktur usaha keluarga dan desa.

Prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah :

- 1) orang bersedia melakukan lebih banyak usaha jika ada “imbalan” dan penyesuaian (diantara anggota keluarga, kelompok keluarga dan masyarakat). Tetapi mereka menjadi lebih terbuka untuk memikul risiko-risiko ekonomi yang lebih banyak lagi.
- 2) perubahan harus dapat lebih diterapkan kepada kelompok, daripada individu, karena berbagai alasan :
  - a. individu-individu terbuka bagi risiko-risiko tambahan (bahkan berupa wabah serta penyakit tanaman dan hewan)
  - b. individu-individu tidak bisa mempengaruhi “kekuatan pasar-aktif” karena jumlahnya tidak besar.
  - c. Individu-individu yang maju pesat, melepaskan diri dari solidaritas dan dukungan kelompok-mereka menjadi sasaran rasa cemburu dan bukan sasaran teladan.
- 3) harus ada suatu proses atau prosedur atau bahkan tanaman *baru* yang memberikan hasil nyata dan hasil tambahan cepat.
- 4) usaha menyokong (“kegiatan pembangunan”) pada prinsipnya harus meliputi keseluruhan *eksistensi* kelompok.

Prinsip terakhir sangat penting, sebab salah satu dari kesesatan-kesesatan dalam usaha pembangunan adalah pemisahan fungsi-fungsi, yang terbesar dalam beberapa badan.

Salah satu dari “paket” yang penuh harapan terwujud dalam “wilayah pembangunan intensif”, yang diterapkan dengan bantuan Bank Dunia di beberapa negara Afrika yang cukup berhasil baik.

Tafsiran saya mengenai usaha ini mesti ada suatu wilayah dengan potensi perkembangan yang berbeda. Wilayah ini harus mulai pada tingkat beberapa desa jika

tidak, maka pasaran kredit dan input-input lain dan pasar untuk hasil-hasil lainnya (2(b)) tidak bisa di pengaruhi.

Harus ada salah satu atau dua “tanaman kunci” yang memberikan hasil nyata (3). Harus terbuka kesempatan bagi suatu kelompok besar (barangkali 300-1000) petani untuk turut mengambil bagian (1, 2C, 3) sekalipun harus dipilih siapa yang boleh turut serta, ada lamaran, dan saringan. Usaha mesti meliputi persediaan input, penggunaan tanah dan tenaga kerja, mungkin juga produk-produk baru, penjualan barang, kredit supaya bisa lebih menyeluruh (4).

Mengenai besarnya badan pembangunan, harus ada suatu regu yang kompak dilapangan, bukan yang terpisah-pisah, apalagi badan-badan urusan jasa khusus yang saling bersaing (4).

Harus diperhatikan bahwa integrasi separuh-separuh dan mengabaikan aspek-aspek lain hanya menghasilkan pengaruh yang sifatnya terbatas. Satu contoh dalam hal ini adalah sistem “kredit terpimpin” di beberapa negara Amerika Latin. Dalam usaha ini perluasan pertanian dikaitkan dengan kredit musiman dan sebaliknya. Malangnya unsur-unsur suplai dan pemasaran acap kali tidak terintegrasi sekalipun jika mesin-mesin atau pupuk bisa diperoleh dengan suatu dari pejabat konsulen pertanian yang disalahkan oleh bank kredit petani. Perlu dikatakan disini bahwa fasilitas ini yang telah dikembangkan pada tahun-tahun tiga puluhan di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagi petani tebu dan tembakau di Indonesia adalah perbaikan bagi fungsi-fungsi yang terpisah satu sama lain.

Rintangan bagi pembangunan yang terintegrasikan adalah terutama akibat adanya cabang-cabang khusus dan “modern” dari dinas-dinas pemerintah. Dan batasan-batasan terdapat lagi di dalam kesulitan integrasi dari dinas-dinas tersebut dan bukan pada kerelaan menerima dari orang-orang desa.

Kesempatan untuk memulai rencana-rencana tersebut sebagian besar tergantung pada penemuan satu atau lebih “tanaman-tanaman” kunci. Acapkali ada tanaman yang lekas rusak (sayur-mayur, buah-buahan, produk-produk susu) dan kebaruannya acapkali terdapat dalam pemasaran dan pengolahan. Banyak hasil bumi ekspor yang bisa dipasarkan termasuk dalam golongan ini. Nampaknya bertentangan mereka membuka ruang lingkup paling besar di wilayah dengan penduduk yang tidak terlampau padat, dan dengan terbukanya kesempatan pribadi serta bersama kearah perbaikan. Di Indonesia ini telah diuraikan oleh D.Penny dan Sajogyo, di Malaysia oleh CL.Wharton. Sesuai dengan sifatnya, pengusaha-pengusaha individual segera diikuti kelompok-kelompok yang lebih besar, bertentangan dengan mitos bahwa orang lebih cenderung untuk mempertahankan yang konservatis.

Bila pilihan-pilihan individual tidak ada atau hampir tidak ada padi, kapas adalah contoh yang khas usaha komunal dan pengaturan bersama seringkali diperlukan. Contoh menarik diperlihatkan dengan penanaman kapas di Mesir. Tanggul irigasi dengan balok (sudah terdapat di Jawa sebelum perang mengingat pengaturan dengan balok penahan), penyemprotan tanaman dengan pesawat terbang atau helikopter, penggunaan pupuk dalam air irigasi, merupakan contoh kegiatan pengaturan. Dalam kerangka ini banyak pekerjaan lain yang bermanfaat dapat diintegrasikan.

Tetapi ini tidak berarti sistem pengatur (perintah) harus diutamakan, atau akan dapat diterapkan di mana-mana. Peraturan berarti kekuasaan berada di tangan para pejabat dan ini dengan mudah bisa memacetkan setiap inisiatif dipihak orang-orang desa. Saya hanya mau melihat bahwa bimbingan tidak bisa dihindarkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Harus diperhatikan pula bahwa itu merupakan keharusan dalam masyarakat modern dewasa ini walaupun tentu saja ada perbedaan tertentu dalam intensitas, yakni antara Eropa Timur dan Eropa Barat.

Wilayah pembangunan intensif harus sejauh mungkin menyentuh eksistensi dan memperbaiki kondisi mereka yang miskin, yang tidak memiliki tanah. Tetapi bila tidak mungkin, dan bila terdapat “kantong-kantong” atau “lapisan” orang-orang yang sangat miskin, maka perbaikan pertanian boleh jadi tidak akan meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam “keterangan hidup” pembangunan harus mencakup apa yang dalam bahasa modern dinamakan “sosial”. Dalam banyak hal, kesempatan apapun yang bisa menciptakan kesempatan kerja harus dipegang erat. Hal ini bisa didapat dalam industri pertukangan atau industri kecil, perdagangan kecil, atau jasa-jasa langsung. Usaha-usaha ini pada umumnya harus disubsidi. Tetapi oleh karena orang-orang ini merupakan *korban-korban* pembangunan (daerah lain dalam suatu negara, atau kelompok lain dalam masyarakat, atau bahkan negara-negara lain), maka tak pelak lagi mereka harus diproduktifkan sebagaimana dulu sebelum “pembangunan” mereka pun (atau orang tua mereka) pernah capai. Bahkan walau semua itu membutuhkan daya dan dana sekali pun.

Sebuah lapangan terbuka lebar bagi perubahan dan penerapan sistem pembangunan total (*system-wide development*) di wilayah pedesaan. Saya yakin para petani dan masyarakat akan bergembira menyambutnya.